



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 223 TAHUN 2021  
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI  
DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ngawi perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 174);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 223 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN NGAWI

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 223) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 26 Februari 2024

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 26 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**ttd.**

**MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 10**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 223 TAHUN 2021  
 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI  
 DI KABUPATEN NGAWI

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN NGAWI  
 TARGET CAPAIAN TAHUN 2021-2023

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
	<b>Intervensi Spesifik</b>						
1	Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan PMT pemulihan	Persen	80	80	80	Dinas Kesehatan
		Persentase kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	Persen	91	92	93	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil	Persen	91	92	93	Dinas Kesehatan
		Persentase Ibu Hamil-K4	Persen	91	93	94	Dinas Kesehatan
		Persentase layanan Ibu Nifas	Persen	95	96	96	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pendampingan Bumil Risti (Bunda Anak Impian/BUAIAN)	Orang	2.500	2.500	2.500	Dinas Kesehatan
	Jumlah Pencegahan Stunting (Bunda Anak Impian/BUAIAN)	Orang	2.600	2.600	2.600	Dinas Kesehatan	

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
2	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persen	81	82	83	Dinas Kesehatan
3	bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Persen	45	50	55	Dinas Kesehatan
		Jumlah kab/kota dengan capaian bayi yang mendapat ASI EKSLUSIF > 50%	Kab/kota	37	38	38	Dinas Kesehatan
4	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Persen	84	86	88	Dinas Kesehatan
5	Pemantauan pertumbuhan di Posyandu	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Persen	70	75	80	Dinas Kesehatan
		Persentase kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran)	Persen	70	75	80	Dinas Kesehatan
		Persentase anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A	Persen	87	88	89	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap	Persen	93,6	94,1	94,6	Dinas Kesehatan
		Persentase balita diare yang memperoleh suplementasi zinc	Persen	95	95	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah kab/kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai target	Kab/Kota	15	15	15	Dinas Kesehatan

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
		Jumlah kab/kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai target	Kab/Kota	15	15	15	Dinas Kesehatan
		Jumlah kab/kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap sesuai target	Kab/Kota	35	38	38	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan Pembinaan Posyandu Balita Purnama Mandiri (PURI) sesuai standar	Kab/Kota	23	25	27	Dinas Kesehatan
6	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yang mendapat tambahan asupan gizi.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yang mendapat makanan tambahan	Persen	85	85	85	Dinas Kesehatan
7	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Persen	93,6	94,1	94,6	Dinas Kesehatan
8	Remaja Putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase remaja putri mendapatkan TTD	Persen	52	54	56	Dinas Kesehatan
9	Tatalaksana pada pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang mampu tata laksana MTBS	Persen	92	93	94	Dinas Kesehatan
		Jumlah kab/kota dengan cakupan persalinan di faskes sesuai target	Kab/Kota	15	15	18	Dinas Kesehatan
10	Layanan gizi pada kelompok masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan UPT Laboratorium Gizi	Orang	6000	7500	10000	Dinas Kesehatan

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
Intervensi Sensitif							
11	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Persen	81,6	97,89	98,94	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Persen	76,92	83	89	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Persentase Tersedianya anggaran untuk pembayaran iuran premi dan bantuan iuran bagi peserta JKN yang didaftarkan Provinsi	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan / Dinas Sosial
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	146	146	146	Dinas Sosial
		Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	44,200	44,200	44,200	Dinas Sosial
		Jumlah keluarga yang mendapat program pemberdayaan sosial ekonomi	orang	40	40	200	Dinas Sosial
		Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial ekonomi produktif	orang	-	40	40	Dinas Sosial

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
14	Keluarga yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah anak balita terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita	orang	-	-	-	Dinas Sosial
		Jumlah anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mendapat bantuan	orang	450	450	450	Dinas Sosial
		Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapat bantuan di luar panti	orang	-	-	-	Dinas Sosial
		Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapat bantuan di dalam panti	orang	-	-	-	Dinas Sosial
15	Promosi & kampanye gizi seimbang	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	Kab/Kota	16	20	32	Dinas Kesehatan
		Jumlah promosi dan inovasi pengembangan produk gizi yang di manfaatkan di masyarakat	promosi	20	25	30	Dinas Kesehatan
		Frekuensi penayangan konten di media sosial tentang stunting	Kali	12	12	12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Jumlah kegiatan promosi pelayanan Kesehatan Gizi UPT Laboratorium Gizi	Kali	-	5	6	Dinas Kesehatan
16	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	Persentase rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	Persen	69	72	75	Dinas Kesehatan

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
		Jumlah desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Desa/Kel	5025	5100	5175	Dinas Kesehatan
17	Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) masing-Masing kabupaten	Kader	-	50	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas TP PKK	Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Orang	31	31	31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program jatim puspa	KPM	127	149	150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah kader PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Orang	900	900	900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Bina Keluarga Remaja	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persen	89	90	91	Dinas Pendidikan

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
		Jumlah peserta pertemuan penguatan kualitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	Orang	50	50	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
20	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang terfasilitasi	Kelompok	13	10	10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21	Kampanye Gemar Makan Ikan	Jumlah masyarakat terakses informasi manfaat konsumsi ikan	Orang	200	100	200	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Jumlah penyediaan pangan sehat	Kab/Kota	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
22	Ketahanan keluarga	Jumlah kader Bina keluarga Balita/keluarga sasaran di Kabupaten yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga dan perlindungan anak	Orang	350	358	500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
		Jumlah kader BKR/keluarga Remaja sasaran di Kab/kota yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga dan perlindungan Anak	Orang	80	89	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Jumlah kader remaja yang mendapatkan capacity building tentang ketahanan keluarga	Orang	80	89	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Jumlah BKL yang dibina dalam rangka Ketahanan Keluarga	Kelompok	193	193	193	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Jumlah remaja yang mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) persiapan kehidupan rumah tangga	Orang	-	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
		Jumlah Mitra organisasi kemasyarakatan kader yang terfasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kelompok	3	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
23	Pembinaan KB aktif dan Kesehatan reproduksi	Jumlah peserta Pembinaan KB aktif dan Kesehatan reproduksi	Orang	4500	5000	5000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
24	Pengendalian penduduk	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	peserta	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
		Persentase Capaian peserta KB aktif	Persen	75,1	75,2	75,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
25	Pemenuhan hak anak	Prosentase jumlah forum anak yang aktif di kabupaten	Persen	85	90	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
26	Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting	Jumlah koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	Laporan	4	4	4	BAPPEDA
		Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan	Persen	87	88	90	Bagian Hukum
27	Bimbingan Perkawinan bagi Penghulu dan Penyuluh	Jumlah Fasilitator yang mengikuti TOT bimbingan perkawinan bagi penghulu dan penyuluh	Orang	50	50	50	Kemenag
28	Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin	Jumlah calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan	Pasang	128.000	128.000	128.000	Kemenag
29	Bimbingan perkawinan remaja usia sekolah	Jumlah remaja usia sekolah mengikuti bimbingan perkawinan	Orang	4.740	4.740	4.740	Kemenag

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
30	Meningkatkan pelayanan KB Pasca Persalinan	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	persen	36	45	60	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
31	Menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	persen	19,9	17,5	16,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
32	Meningkatkan cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	persen	20	40	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
33	Meningkatkan cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	persen	20	50	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
34	Meningkatkan desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	persen	60	70	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
35	Meningkatkan PIK-R dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Repaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	persen	40	60	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
36	Meningkatkan Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Persentase Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	persen	20	50	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
37	Meningkatkan Kab/Kota dengan ASFR di bawah 18 per 1000	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) dibawah 18 per 1.000.	Persen	42	50	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
38	Menurunkan unmet need	Persentase unmet need (PUS yang membutuhkan pelayanan KB tapi belum terlayani)	persen	10	9,5	8,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
39	Meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan updating data keluarga beresiko stunting secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
40	Peningkatan pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	persen	-	50	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
41	Peningkatan pengelolaan kampung KB untuk percepatan penurunan stunting	Jumlah Kampung KB yang sudah mengembangkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	Desa	-	30	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
42	Pemenuhan KIT Siap Nikah anti Stunting	Tersedianya Alat Peraga KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Percepatan Penurunan Stunting di Kelompok PIK-R	Unit	9	10	64	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
43	Pemenuhan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Stunting	Tersedianya Alat Peraga KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Percepatan Penurunan Stunting di Kelompok BKB	Unit	9	10	64	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
44	Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) diseluruh Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Tim Pendamping Keluarga (TPK) minimal satu Desa/kelurahan ada 1 TPK yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB / Kader lainnya yang mendampingi keluarga beresiko stunting	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
45	Orientasi manajemen dan substansi stunting bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Persentase Tim Pendamping Keluarga (TPK) Yang terlatih	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian			Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5			6
46	Pengawasan Makanan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	80	82	84	Dinas Kesehatan
47	Menurunkan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang tidak memenuhi syarat	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	sekolah	42	62	82	Dinas Kesehatan
48	Pembinaan Desa menuju pangan aman	Jumlah Desa Pangan Aman	desa	19	28	37	Dinas Kesehatan
49	Pembinaan Pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	pasar	12	18	25	Dinas Kesehatan
50	Pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat	Tingkat efektivitas KIE, Obat, dan Makanan yang Efektif	Indeks	73	77	80	Dinas Kesehatan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
 223 TAHUN 2021  
 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 TERINTEGRASI  
 DI KABUPATEN NGAWI

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN NGAWI  
 TARGET CAPAIAN TAHUN 2024

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya layanan intervensi spesifik	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen	90	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persen	80	Dinas Kesehatan
		Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Persen	58	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Persen	80	Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Persen	80	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Persen	90	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Persen	90	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Persen	90	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Persen	90	Dinas Kesehatan
2	Tersedianya layanan intervensi Sensitif	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Persen	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	Persen	15,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas	Persen	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Persen	90	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Persen	100	Dinas Sosial
		Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	Persen	70	Dinas Kesehatan
		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Persen	100	Dinas Sosial
		Jumlah desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Persen	90	Dinas Kesehatan

B. Uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan Stunting

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa					
1	Meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting	Terselenggaranya Rembug Stunting tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan /tahun	1 kali	BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan /tahun	1 kali	BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Terselenggaranya rembug Stunting tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan /tahun	1 kali	Kecamatan
		Tersedianya kebijakan/peraturan tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting	Jumlah Peraturan	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai dengan kebutuhan	Persen	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah desa / kelurahan bebas stunting	Persen	100	BAPPEDA, Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa
		Pemerintah Daerah Kabupaten yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Persen	100	BAPPEDA
2	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Persen	100	Dinas Sosial

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat					
1	Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	Kanal/metode setiap bulan	3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Persen	90	Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	70	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Persen	90	Dinas Kesehatan
2	Melakukan penguatan kapasitas instituti dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting	Jumlah Kabupaten / kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	100	Dinas Pendidikan
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan	Persen	90	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		pelatihan di kabupaten/kota			
		Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Persen	70	Dinas Pendidikan
		Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di Posyandu	Persen	90	Dinas Kesehatan
		Presentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Presentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Persen	90	Dinas Sosial
		Presentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		3	Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama.	Jumlah Pertemuan setiap tahun

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.				
		Presentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting.	Persen	90	Kementerian Agama
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah kabupaten / kota dan Pemerintah Desa					
1	Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat daerah	Jumlah Kabupaten / kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).	Persen	100	BAPPEDA
		Persentase kabupaten / kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Persen	100	BAPPEDA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Persen	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	100	Dinas Kesehatan
		Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima dan mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persen	90	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	Persen	90	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persen	80	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI).	Persen	80	Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Persen	80	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat tata laksana gizi buruk.	Persen	90	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Persen	90	Dinas Kesehatan
		Persentase Kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan fasilitasi sebagai desa ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan	Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting.	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	kehidupan berkeluarga				Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Persen	90	Dinas Kesehatan
		Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Persen	90	Dinas Kesehatan
		Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting.	Jumlah Kegiatan Tahun	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase kabupaten dengan <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Persen	18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Persen	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana.	persen	7,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada Tingkat individu, keluarga dan masyarakat					
1	Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Persen	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase Keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Persen	90	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Persen	75	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi					
1	Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting.	Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Persen	90	BAPPEDA
		Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Publikasi data Stunting tingkat kabupaten	Jumlah Publikasi per tahun	1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan
		Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan setiap tahun	2	BAPPEDA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan setiap tahun	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	Jumlah kegiatan / tahun	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	Presentase Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem informasi Keluarga (SIGA)	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Jumlah sistem	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	Persen	100	Dinas Kesehatan
3	Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Jumlah Perguruan tinggi yang melakukan pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.	Jumlah Perguruan tinggi	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian 2024	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
4	Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan	Tersusunnya platform berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Jumlah Platform	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**